

RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

2025

**PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diambil dari Renstra DPUPR 2021-2026.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahunan ini diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang berlandaskan pada visi dan misi Kabupaten yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak, khususnya kepada saudara-saudara Sekretaris, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah berpartisipasi dalam mempersiapkan dan merumuskan kebijakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dituangkan di dalam Rencana Kerja Perubahan Tahunan.

Kuala Tungkal, April 2025

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

APRI DASMAN, S.ST, MT
NIP. 19730405 199303 1 004

BAB

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perubahan dari kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Sebelumnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum. sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sepenuhnya akan mendukung Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Publik melalui Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi, Bidang Penataan Ruang serta Bagian Sekretariat. Dalam menjalankan peran strategisnya ini SKPD berpedoman kepada Rancangan Akhir Rencana Strategis.

Dalam pelaksanaannya Renstra SKPD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja) yang merupakan Rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja-SKPD disusun berpedoman pada RPJMD, dan Renstra SKPD dalam hal ini adalah RPJMD tahun (2021-2026) sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih. Kegiatan-kegiatan pada Renja SKPD akan berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra SKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang,

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi perumusan kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan dan pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah dokumen Rancangan Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Rancangan Renja SKPD harus mengacu kepada RKPD yang telah dibuat, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara parallel dan sifatnya saling member masukan dalam proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024.
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2020 Tentang rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013-2033
16. Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 merupakan dokumen rancangan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan yaitu :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi Infrastruktur sarana dan prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Sebagai acuan bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan
3. Sebagai titik Akhir dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 adalah untuk memberikan arah Rancangan Akhir Rencana pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Publik satu Tahun kedepan, sehingga pelaksanaan pembangunan bersinergis antara sektor dan sub sektor lainnya, guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah maka tujuan Renja ini adalah :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Memberikan pedoman, alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025.
3. Sebagai paduan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika

Sistematika Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025 DAN PREDIKSI TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum
- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Dinas Pekerjaan Umum
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3.3. Program dan Kebijakan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 (Per Triwulan I bulan Maret 2025)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 252.408.956.568,00 dan terealisasi sebesar Rp. 132.741.732.039,14 atau (52,59%)

Secara rinci evaluasi pada tahun anggaran 2024 ini dapat diuraikan sebagai berikut :

I. BAGIAN SEKRETARIATP

Bagian Sekretariat melaksanakan 1 (Satu) program dengan total anggaran sebesar Rp.11.596.982.324,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.814.455.467,00 (30,03%) dengan 9 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

II. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga melaksanakan 1 (satu) program dengan total anggaran sebesar Rp.166.939.970.850,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.50.700.099.780,21 (30,37 %) dengan 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan.

III. BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN JASA KONSTRUKSI

Bidang Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi melaksanakan 2 (dua) program dengan total anggaran sebesar Rp.21.857.518.398,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.032.034,00 (4,8%) dengan 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan.

IV. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya melaksanakan 3 (Tiga) program dengan total anggaran sebesar Rp.70.393.877.700,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.878.714.374,00 (9%) dengan 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan.

V. BIDANG PENATAAN RUANG

Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi melaksanakan 1 (satu) program dengan total anggaran sebesar Rp.3.535.341.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.516.297.000,00 (1,29%) dengan 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

- A. Aspek pelayanan umum yang berfokus pada pelayanan urusan wajib pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat yang di amanatkan pada RPJMD kab. Tanjung jabung Barat 2021 – 2026 dan realisasinya sampai dengan 2024 adalah :

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2021)	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi s/d Triwulan 2 2024
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	33	53	49	45,83
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air limbah	%	63,11	100%	72	76,40
3	persentase rumah tangga terlayani air minum di wilayah kabupaten	%	60%	100%	85	87,68
4	persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten	%	0	70	60	62

B. Capaian dari Indikator kinerja DPUPR terhadap target RPJMD

1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sampai dengan triwulan 2 pada tahun 2024 terealisasi 45,83 % terhadap target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 49% dengan capaian sebesar 97,51% untuk tahun 2024, dan terhadap target akhir RPJMD masih tersisa 14% yang optimis dapat DPUPR kab. Tanjung Jabung Barat selesaikan melalui dukungan dana APBD II, APBD I, dan APBN.
2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air limbah sampai dengan triwulan 2 pada tahun 2024 terealisasi sebesar 76,40% terhadap target 72%, dengan capaian 106,11%, Adapun Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 106,11%. Capaian ini dikategorikan Sangat Baik, karena telah melewati target yang telah di tetapkan, target ini dapat di capai karena adanya bantuan pendanaan dari APBN pada tahun 2023.

3. Target kinerja persentase rumah tangga terlayani air minum di wilayah kabupaten pada tahun 2023 adalah 81% dengan realisasi 87,68 % sehingga capaian nya adalah sebesar 108,25% Atau terdapat 73.298 rumah tangga yang telah terlayani akses air minum baik dari pelayanan yang berbasis perpipaan atau pun yang non perpipaan dari 83.654 jumlah total rumah tangga di kabupaten Capaian ini dikategorikan baik.
4. Target kinerja persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten pada tahun 2023 adalah 55 % dan realisasi 62 %. Adapun Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 113 %. Capaian ini dikategorikan sangat Baik.

Terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih konsisten berusaha untuk melakukan penyusunan walaupun berbagai kesulitan ditemui didalam menyusun SPM. Kesulitan mendasar adalah karena keterbatasan data yang dimiliki.

Upaya pemenuhan dilakukan dari berbagai upaya dan berbagai sumber dana yang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi isu penting adalah sebagai berikut :

1. Bidang Bina Marga

- a. Tingkat kerusakan jalan yang relatif lebih cepat dikarenakan sebagian wilayah berada di tanah gambut yang labil.
- b. Kerusakan Jembatan Besi, sehingga diperlukan biaya Pemeliharaan yang cukup besar.
- c. Banyaknya jumlah kendaraan yang lewat melebihi tonase MST 6 Ton sehingga mempercepat kerusakan jalan

- d. Belum memiliki peralatan dan laboratorium yang memadai untuk melakukan Uji Lab. Terhadap Aspal, Beton, Tanah dan Air.
- e. Kondisi lahan yang berawa dan bergambut membutuhkan biaya yang mahal untuk pembangunan jalan dan jembatan
- f. Kondisi alat berat yang dimiliki juga sudah sangat uzur, sehingga perlu adanya peremajaan.

2. Bidang Cipta Karya

- a. Cakupan layanan air minum SPAM perpipaan masih relatif rendah.
- b. Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan belum Optimal.
- c. Penampungan Air Hujan yang dibangun belum dilakukan pengawasan, pembinaan dan penengndalian.
- d. Cakupan layanan sanitasi masih rendah.
- e. Sarana dan prasarana PLP skala kabupaten belum layak.
- f. Masih banyak terdapat bangunan yang belum memiliki IMB.
- g. Masih kurangnya parasarana Olah Raga, Kesehatan Pendidikan, dan prasarana fisik pemerintahan.

3. Bidang Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi

- a. Khusus di Wilayah Perkotaan Kuala Tungkal Drainase Primer dangkal.
- b. Belum tersedia air baku yang memadai untuk kebutuhan air bersih.
- c. Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air hampir semua tergantung dengan kondisi muka air seperti pekerjaan saluran irigasi, rawa, dan tanggul. Akibatnya saluran irigasi, rawa dan tanggul cepat mengalami kerusakan.
- d. Lahan persawahan yang beririgasi secara berangsur-angsur berkurang atau beralih fungsi sejalan dengan pertambahan penduduk dan perkembangan perkebunan seperti kelapa sawit, pinang dan karet mengakibatkan objek kegiatan bidang ini berkurang.
- e. Pengembangan SIPJAKI belum optimal.
- f. Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultasi relatif rendah.

4. Bidang Penataan Ruang

- a. Belum adanya turunan dari Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Pelayanan perizinan belum sepenuhnya diterbitkan dengan mempedomani RTRW.
- c. Belum terlaksananya penegendalian tata ruang secara optimal.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan tata ruang.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari rancangan Renja yang telah disusun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan Renstra Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator Kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di samping itu, dokumen Rencana Kerja Perubahan juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung arah kebijakan, telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program dan Kegiatan yang sesuai dengan permendagri 050 Tahun 2022.

3.1 Tela'ah Terhadap Kebijakan Nasional

1. Tersedianya air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi seluruh penduduk 100 % sesuai dengan standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
2. Tersedianya Sarana dan prasarana sanitasi dan air limbah yang baik untuk mendukung penurunan stunting bagi seluruh penduduk 100 % sesuai dengan standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi yang diemban untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan organisasi dirumuskan berdasarkan visi misi tersebut.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sarana transportasi untuk mendukung perekonomian masyarakat, dan pemenuhan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
2. Terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat.

Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya jalan kabupaten yang mantap
2. Terjaminnya layanan pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat
3. Tersedianya air minum yang layak bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari
4. Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian dan perkebunan rakyat.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam perubahan RPJMD diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penataan Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

9. Program Penyelenggaraan Jalan

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel : 3.1 terlampir

MATRIK RANCANGAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG APBDP 2025

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Kinerja Program	APBD 2025		Usulan APBD-P 2025	
						(outcome) dan Kegiatan (output)	target	Rp	target	Rp
							-16-	-17-	-18-	-19-
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	9.254.094.724	12 bulan	9.927.300.379
X	XX	01	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	293.000.000	12 bulan	293.000.000
X	XX	01	02:01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	61.000.000	8 dokumen	61.000.000
X	XX	01	02:01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	112.000.000	5 dokumen	112.000.000
X	XX	01	02:01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000
X	XX	01	02:01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	20.000.000	5 Laporan	20.000.000
X	XX	01	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pengadministrasian keuangan	12 bulan	6.414.136.074	12 bulan	6.414.136.074
X	XX	01	02:02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang	5.589.696.074	57 orang	5.589.696.074
X	XX	01	02:02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	748.440.000	12 Dokumen	748.440.000
X	XX	01	02:02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16 laporan	76.000.000	16 laporan	76.000.000
X	XX	01	02:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang dikelola dan tepat waktu	12 Laporan	69.535.000	12 Laporan	69.535.000
X	XX	01	02:03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	69.535.000	2 Laporan	69.535.000
X	XX	01	02:04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pengadministrasian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1 Laporan	77.944.400	1 Laporan	77.944.400
X	XX	01	02:04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	77.944.400	1 Laporan	77.944.400
X	XX	01	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	218.500.000	12 bulan	218.500.000
X	XX	01	02:05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	274 Stel	113.800.000	274 Stel	113.800.000
X	XX	01	02:05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	104.700.000	1 dokumen	104.700.000
X	XX	01	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pengadministrasian umum daerah	12 bulan	570.614.000	12 bulan	609.038.000
X	XX	01	02:06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	104.360.000	100 Paket	104.360.000
X	XX	01	02:06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	53.643.000	50 Paket	53.643.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Kinerja Program	APBD 2025		Usulan APBD-P 2025	
						(outcome) dan Kegiatan (output)	target	Rp	target	Rp
							-16-	-17-	-18-	-19-
X	XX	01	02.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.643.000	12 Paket	133.067.000
X	XX	01	02.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	26.475.000	12 Paket	26.475.000
X	XX	01	02.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	30.840.000	5 Dokumen	30.840.000
X	XX	01	02.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	195.603.000	12 Laporan	195.603.000
X	XX	01	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	65.050.000	12 Dokumen	65.050.000
X	XX	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD	19 unit	216.852.000	19 unit	562.754.405
X	XX	01	02.07	06	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	216.852.000	10 unit	562.754.405
X	XX	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	326.500.000	12 Bulan	326.500.000
X	XX	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	10.600.000	20 Laporan	10.600.000
X	XX	01	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	156.000.000	12 Laporan	156.000.000
X	XX	01	02.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	159.900.000	12 Laporan	159.900.000
X	XX	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang penunjang yang di pelihara	12 bulan	1.067.013.250	12 bulan	1.355.892.500
X	XX	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan yang di pelihara	5 unit	177.650.000	5 unit	177.650.000
X	XX	01	02.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah alat berat yang di pelihara	5 unit	493.580.000	5 unit	493.580.000
X	XX	01	02.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya	57 unit	105.850.000	57 unit	105.850.000
X	XX	01	02.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bangunan gedung kantor yang di pelihara	2 unit	289.933.250	2 unit	578.812.500
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten	65%	21.519.174.855	65%	90.507.150.000
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Bangunan pengaman pantai/sungai yang terbangun di wilayah sungai kabupaten	75%	11.834.280.000	75%	41.000.000.000
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	3 unit	6.373.040.000	3 unit	15.000.000.000
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2,2 km	5.461.240.000	2,2 km	26.000.000.000
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase jaringan irigasi yang terbangun di wilayah daerah irigasi	75%	9.684.894.855	75%	49.507.150.000
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,4 km	990.920.000	1,4 km	6.655.000.000
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	6 km	6.781.300.000	6 km	32.670.000.000
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 km	1.912.674.855	10 km	9.982.500.000
1	03	02	2.02	34	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	1 Lembaga	-	1 Lembaga	199.650.000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Kinerja Program	APBD 2025		Usulan APBD-P 2025	
						(outcome) dan Kegiatan (output)	target	Rp	target	Rp
							-16-	-17-	-18-	-19-
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase rumah tangga terlayani air minum di wilayah kabupaten	92%	5.174.920.000	92%	17.569.200.000
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga terlayani Sistem pengelolaan air bersih	2050	5.174.920.000	2050	17.569.200.000
1	03	03	2.01	26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	100 liter/detik	5.174.920.000	100 liter/detik	17.569.200.000
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten terhadap jumlah kebutuhan drainase dalam kabupaten	48%	908.920.000	48%	1.639.920.000
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Unit Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4500 m	908.920.000	4500 m	1.639.920.000
1	03	06	2.01	29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	4500 M	908.920.000	4500 M	1.639.920.000
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan Gedung yang di Tata Sesuai Perencanaan	100%	52.322.037.700	100%	110.868.997.700
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	jumlah bangunan gedung yang di bangun dan di pelihara	10 Unit	52.322.037.700	10 Unit	110.868.997.700
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	120 Dokumen	868.997.700	120 Dokumen	868.997.700
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsua, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	15 dokumen	51.453.040.000	15 dokumen	110.000.000.000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	51%	171.692.220.350	51%	567.488.520.000
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	panjang jalan kabupaten yang di tingkatkan dan di pelihara	50 km	171.692.220.350	50 km	567.488.520.000
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5 dokumen	1.546.920.000	5 dokumen	4.862.025.000
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 dokumen	715.320.000	1 dokumen	715.320.000
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	30 km	141.109.833.558	30 km	486.202.500.000
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	10 km	8.604.240.000	10 km	34.034.175.000
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 km	7.581.057.128	10 km	24.310.125.000
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang di rehabilitasi	10 unit	10.899.809.664	10 unit	11.576.250.000
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	jumlah Jembatan yang di Pelihara Rutin	10 unit	1.235.040.000	10 unit	5.788.125.000
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi terlatih dan terdata dalam SIPJAKI	22,00%	1.125.098.398	22,00%	1.125.098.398

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
						Kinerja Program	APBD 2025		Usulan APBD-P 2025	
						(outcome) dan Kegiatan (output)	target	Rp	target	Rp
							-16-	-17-	-18-	-19-
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	rasio tenaga terampil konstruksi terlatih terhadap jumlah kebutuhan tenaga terampil dalam kabupaten	25,63%	1.125.098.398	25,63%	1.125.098.398
1	03	11	2.01	16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi Atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	200 Orang	1.125.098.398	200 Orang	1.125.098.398
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Peraturan / kebijakan tata ruang	5 dokumen	3.514.341.000	5 dokumen	8.027.361.000
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	tersedianya dokumen RTRW, RRTR dan RDTR Kabupaten	4 buku	2.030.660.000	4 buku	4.665.600.000
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 dokumen	2.030.660.000	3 dokumen	4.665.600.000
1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ruang yang diberikan	45 dokumen	1.288.161.000	45 dokumen	1.288.161.000
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	45 dokumen	1.288.161.000	45 dokumen	1.288.161.000
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya kesepakatan untuk pemanfaatan runag dan investasi pembangunan	1 dokumen	195.520.000	1 dokumen	2.073.600.000
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 dokumen	195.520.000	1 dokumen	195.520.000
JUMLAH TOTAL								265.510.807.027		807.153.547.477

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai penjabaran Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 memuat strategi dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan berdasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik dan Penataan Ruang yang handal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel menuju masyarakat Tanjung Jabung Barat yang sejahtera.